



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA CIMAHI TAHUN 2025

Pemerintah Kota Cimahi merilis Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025. Laporan ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 69 ayat (1). Dalam aturan tersebut, Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang kemudian disertai dengan Ringkasan RLPPD yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan. LPPD Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2026-2029. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah yang meliputi urusan konkuren, tugas pembantuan, serta tugas umum pemerintahan. Laporan ini diharapkan dapat meningkatkan citra dan wibawa pemerintahan daerah di mata publik.

HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

HASIL EPPD TAHUN 2024

Kementerian Dalam Negeri sampai saat ini belum merilis Hasil EPPD Tahun 2024.

OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tahun 2024 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam laporan Nomor : 19.B/LHP/XVIII.BDG/05/2015 Tanggal 5 Mei 2025.

RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH;

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Unaudited) Tahun 2025 Realisasi Pendapatan Kota Cimahi Tahun 2025 mencapai sebesar 1.583.167.462.679 dan Realisasi Belanja Kota Cimahi Tahun 2025 mencapai 1.662.426.274.003 Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN TAHUN 2025

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	PENDAPATAN	1.610.312.139.522,	1.583.167.462.679	98,31
5	BELANJA	1.762.365.524.440	1.662.426.274.003	94,32

REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN REALISASI PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN TAHUN 2025

Kode rekening	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi (Rp)	%
4	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	578.392.000.964	579.460.288.601	100,18
4.2	Pendapatan Transfer	1.031.920.138.558	1.003.707.174.078	97,26
	Jumlah	1.610.312.139.522	1.583.167.462.679	98,31
5	BELANJA			
5.1	Belanja Operasi	1.547.587.573.652	1.482.337.768.913	95,78
5.2	Belanja Modal	204.133.498.486	175.002.129.170	85,72
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.644.452.302	5.086.375.920	47,78
	Jumlah	1.762.365.524.440	1.662.426.274.003	94,32
	Surplus/(Defisit)	(152.053.384.918,94)	79.258.811.324	5,68

Harapan dan Tujuan Penyampaian RLPPD 2025:
Penyampaian Ringkasan RLPPD Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan daerah di masa mendatang. Pemerintah Kota Cimahi berharap laporan ini menjadi alat ukur yang transparan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan rilis ini, Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta sebagai langkah untuk terus memperbaiki pelayanan dan pembangunan di Kota Cimahi.



CAPAIAN KINERJA MAKRO

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2025	PERUBAHAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pembangunan Manusia		80,30	80,85	0,68
2	Presentase Penduduk Miskin	%	4,39	4,20	-4,33
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,97	8,75	-2,45
4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK [seri 2010]	%	5,26	5,33	1,33
5	PDRB per kapita (ADHK)	Ribu Rupiah	45.593,82	47.415	3,99
6	PDRB per kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	72.528,37	76.989	6,15
7	Gini Rasio		0,402	0,365	-9,20

*Sumber data :Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik Kota Cimahi



JUMLAH PENDUDUK KOTA CIMAHI TAHUN 2025

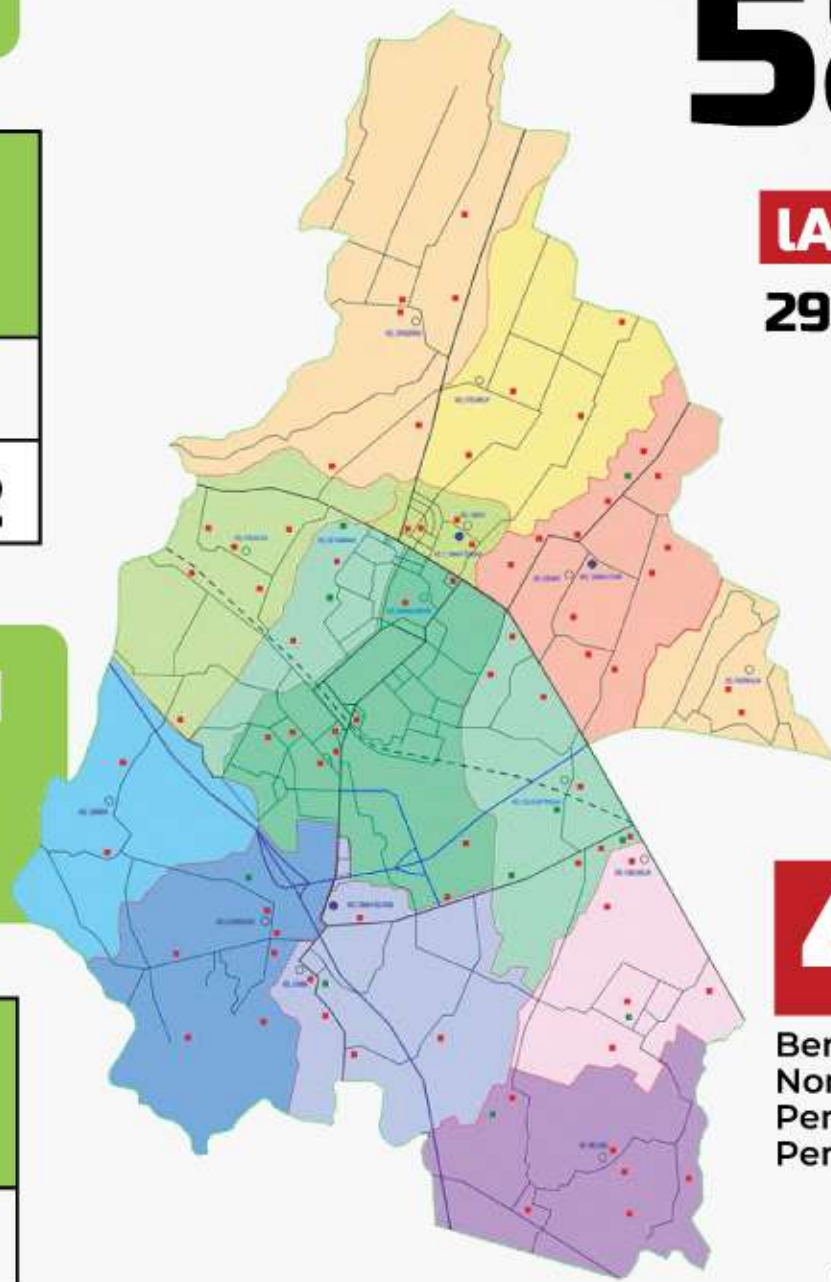
584.820 ^{JIWA}

LAKI-LAKI PEREMPUAN
293.756 ^{JIWA} 291.064 ^{JIWA}

LUAS WILAYAH KOTA CIMAHI

4.243,20 Ha

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.11-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Kota Cimahi



KOTA CIMAHI BERHASIL MENCIPTAKAN

177 INOVASI DAERAH



TAHUN 2025 KOTA CIMAHI MENDAPATKAN

13 PENGHARGAAN TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT NASIONAL



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA CIMAHI TAHUN 2025



RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 (%)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94,12	93,20
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,86	IKK pada tahun 2025 dihapus
3	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	-	98,80
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,33	IKK pada tahun 2025 dihapus
5	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	79,11	85,94
6	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	-	96,06
7	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	-	95,65

PEKERJAAN UMUM

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 (%)
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	0	100
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	0
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100	100
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78,17	78,93
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91,28	90,87
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	23,19	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	98,42	98,78
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	IKK pada Tahun 2025 dihapus
10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	-	0

SOSIAL

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 (%)
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	IKK pada Tahun 2025 dihapus
2.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100	100
3.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	41,44
4.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	94,38
5.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	68,26
6.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	100
7.	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	-	72,93

URUSAN KESEHATAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 (%)
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit di Kota	2,73	IKK pada Tahun 2025 dihapus
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	IKK pada Tahun 2025 dihapus
3	Persentase kematian ibu	-	0,02
4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	-	9,81
5	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	102,19	100
6	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,61	100
7	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100
8	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100
9	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84,92	100
10	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	58,39	100
11	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	58,32	100
12	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
13	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
14	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100

PERUMAHAN RAKYAT

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 (%)
1.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	0	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	0	22,13
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	49,03	5,3
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,45	0,45
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1,70	100

TRANTIBUMLINMAS

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 (%)
1.	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	IKK pada Tahun 2025 dihapus
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	48,22	100
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	93,87	97,82
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9.32 menit	IKK pada Tahun 2025 dihapus
8.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	-	100

